



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
Jalan Raya El Tari Kupang Nomor 52 Kupang  
**KUPANG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 158 /KEP/HK/2023**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN MATERI TEKNIS**  
**DOKUMEN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR**  
**DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 152/KEP/HK/2022 telah ditetapkan Kelompok Kerja Penyusunan Materi Teknis Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Perubahannya yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Teknis;
  - b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan Kelompok Kerja dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 152/KEP/HK/2022, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Penyusunan Materi Teknis Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
  3. Peraturan Pemerintah ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 701);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Kelompok Kerja Penyusunan Materi Teknis Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pengarah dan Pembina dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tugas dari Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah mempercepat proses penyusunan materi teknis perairan pesisir dalam rangka integrasi RZWP3K Provinsi Nusa Tenggara Timur ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dibantu oleh Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

**KEDELAPAN : ...**

**KEDELAPAN** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 152/KEP/HK/2022 tentang Kelompok Kerja Penyusunan Materi Teknis Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 10 APRIL 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PLT. SEKRETARIS DAERAH, *Re*



**JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196401101989032015

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Kelompok Kerja dan Tim Teknis masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 158 /KEP/HK/2023

**TANGGAL** : 10 April 2023

**TENTANG PENGARAH DAN PEMBINA KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN MATERI TEKNIS DOKUMEN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

| <b>NO</b> | <b>NAMA/JABATAN</b>                   | <b>KEDUDUKAN</b> | <b>RINCIAN TUGAS</b>  |
|-----------|---------------------------------------|------------------|---|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                              | <b>3</b>         | <b>4</b>  |
| 1.        | Gubernur Nusa Tenggara Timur          | Pengarah         | Memberikan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja. |
| 2.        | Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur    | Pengarah         |   |
| 3.        | Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Timur | Pembina          |   |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PLT. SEKRETARIS DAERAH, *ke*

*J*  
**JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196401101989032015

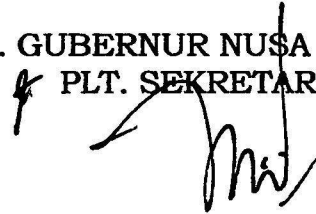
**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 158 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 10 April 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN MATERI TEKNIS DOKUMEN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

| <b>NO</b> | <b>NAMA/JABATAN</b>   | <b>KEDUDUKAN</b> | <b>RINCIAN TUGAS</b>  |
|-----------|---|------------------|---|
| <b>1</b>  | <b>2</b>  | <b>3</b>         | <b>4</b>  |
| 1.        | Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT  | Ketua            | a. mengoordinasikan secara umum kegiatan penyusunan materi teknis dokumen final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;<br>b. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan materi teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;<br>c. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi materi teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan<br>d. memberikan masukan kepada gubernur sebagai bahan rekomendasi atas penyusunan materi teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, |
| 2.        | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT  | Sekretaris       |   |
| 3.        | Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT   | Anggota          |   |
| 4.        | Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT  | Anggota          |   |
| 5.        | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Provinsi NTT  | Anggota          |   |
| 6.        | Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT  | Anggota          |   |
| 7.        | Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT   | Anggota          |   |
| 8.        | Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT   | Anggota          |   |
| 9.        | Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT  | Anggota          |   |
| 10.       | Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional NTT   | Anggota          |   |
| 11.       | Kepala Balai Besar Kawasan Sumber Daya Alam NTT   | Anggota          |   |
| 12.       | Kepala Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar Kementerian Kelautan dan Perikanan | Anggota          |   |

|     |   |         |  |
|-----|---|---------|--|
| 13. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat Provinsi NTT | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan penyalarsan dan penyusunan integrasi RZWP3K-RTRW</li> <li>b. mengoordinasikan secara umum kegiatan penyusunan materi teknis dokumen final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</li> <li>c. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan materi teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</li> <li>d. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi materi teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</li> <li>e. memberikan masukan kepada Gubernur sebagai bahan rekomendasi atas penyusunan materi teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul>          |
| 14. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT      | Anggota | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RZWP3K-RTRW;</li> <li>b. mengoordinasikan secara umum kegiatan penyusunan materi teknis dokumen final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</li> <li>c. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan materi teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</li> <li>d. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi materi teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</li> <li>e. memberikan masukan kepada gubernur sebagai bahan rekomendasi atas penyusunan materi teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</li> </ul> |

|     |  |         |  |
|-----|--|---------|--|
| 15. | Kepala Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT           | Anggota | <p>a. melaksanakan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis RZWP3K-RTRW</p> <p>b. mengoordinasikan secara umum kegiatan penyusunan materi teknis dokumen final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>c. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan materi teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>d. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi materi teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>e. memberikan masukan kepada gubernur sebagai bahan rekomendasi atas penyusunan materi teknis Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> |
| 16. | Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT | Anggota |  |
| 17. | Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT                                       | Anggota |  |
| 18. | Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT           | Anggota |  |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 PLT. SEKRETARIS DAERAH,

  
**JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 196401101989032015

**LAMPIRAN III****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 158 /KEP/HK/2023**TANGGAL** : 10 APRIL 2023**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN MATERI TEKNIS DOKUMEN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

| <b>NO</b> | <b>NAMA/JABATAN</b>  | <b>KEDUDUKAN</b> | <b>RINCIAN TUGAS</b>  |
|-----------|--|------------------|---|
| 1         | 2  | 3                | 4   |
| 1.        | Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT   | Ketua            | a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan materi dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;<br>b. menyusun dokumen materi teknis dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;<br>c. memaduserasikan, menyandingkan dan menyelaraskan materi teknis dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan<br>d. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan serta memberikan alternatif pemecahan masalah dalam penyusunan materi teknis dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. |
| 2         | Kepala Cabang Dinas Wilayah Kab. Sumba Timur, Kab. Sumba Tengah, Kab. Sumba Barat dan kab. Sumba Barat Daya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT | Sekretaris       |   |
| 3.        | Kepala Cabang Dinas Wilayah Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggarai dan Kab. Manggarai Timur pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT                   | Anggota          |   |
| 4.        | Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Alor pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT  | Anggota          |   |
| 5.        | Kepala Cabang Dinas Wilayah Kota Kupang, Kab. Kupang, Kab. Rote Ndao dan Kab. Sabu Raijua pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT                   | Anggota          |   |
| 6.        | Kepala Cabang Dinas Wilayah Kab. Lembata, kab. Flores Timur dan Kab. Sikka pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT                                  | Anggota          |   |
| 7.        | Kepala Cabang Dinas Wilayah Kab. TTS, Kab. TTU, Kab. Belu dan Kab. Malaka pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT                                   | Anggota          |   |
| 8.        | Kepala Bidang Destinasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT  | Anggota          |   |
| 9.        | Kepala Bidang Penataan dan Pemanfaatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT  | Anggota          |   |
| 10.       | Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi NTT                                  | Anggota          |   |
| 11.       | Kepala Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT  | Anggota          |   |

|     |   |         |   |
|-----|---|---------|---|
| 12. | Fransiskus Sape, SH/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT                            | Anggota |   |
| 13. | Kepala Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT  | Anggota |   |
| 14. | Gabriel Adu, S.Si, M. Si / Perencana Ahli Muda pada Bappelitbangda Provinsi NTT   | Anggota |   |
| 15. | Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi NTT                                | Anggota | a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan materi dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;  |
| 16. | Erick Muskita, S.Hut, M.Hut/Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT              | Anggota | b. menyusun dokumen materi teknis dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;   |
| 17. | Veroliene E. Foenay, ST, MM/ Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT | Anggota | c. memaduserasikan, menyandingkan dan menyelaraskan materi teknis dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan   |
| 18. | Hendrikus Bebe Aran, S.IP/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT                                    | Anggota | d. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan serta memberikan alternatif pemecahan masalah dalam penyusunan materi teknis dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. |
| 19. | Habel E. Theedens, S.TP, MM / Staf pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT   | Anggota |   |
| 20. | Yosualdus S. Masyhur, ST / Staf pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT   | Anggota |   |
| 21. | Thri Heni Utami Radiman, S.St.Pi.,M.Env.Policy.Mgt/ Staf pada Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang                     | Anggota |   |
| 22. | Ikrima Avicenna, S.Si / Staf pada Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang   | Anggota |   |
| 23. | Alexander Tanody, S.Pi, M.Si/ Politeknik Pertanian Kupang   | Anggota |   |
| 24. | Ir. Jotham S. R. Ninef, M.Sc / Praktisi Dewan Konservasi Perairan Provinsi  | Anggota |   |
| 25. | Rusydi, S.Pi, M.Si/ Universitas Muhammadiyah Kupang   | Anggota |   |
| 26. | Donny Bessie, S.Pi, M.Si/ Universitas Kristen Artha Wacana Kupang   | Anggota |   |
| 27. | Lumban Nauli L. Toruan, S.Pi, M.Si / Universitas Nusa Cendana Kupang  | Anggota |   |

|     |  |         |  |
|-----|--|---------|--|
| 28. | Dr. Elisa Iswandono, S.Pi., M.Si / Staf pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT                           | Anggota | <p>a. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan materi dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>b. menyusun dokumen materi teknis dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;</p> <p>c. memaduserasikan, menyandingkan dan menyelaraskan materi teknis dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan</p> <p>d. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan serta memberikan alternatif pemecahan masalah dalam penyusunan materi teknis dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> |
| 29. | Dhika Rino Pratama /Yayasan Konservasi Alam Nusantara  | Anggota |  |
| 30. | Miko Budi Raharjo / WWF Indonesia  | Anggota |  |
| 31. | Daniel E. Leatemia /WWF Indonesia  | Anggota |  |
| 32. | Sri Pratiwi S. Dewi, S.Pi., M.I.L / Staf pada Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Denpasar Wilker Kupang | Anggota |  |

#### **SEKRETARIAT**

|    |   |            |   |
|----|---|------------|---|
| 1. | Kepala Cabang Dinas Wilayah Kab. Ende, Kab. Ngada dan Kab. Nagekeo pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT | Ketua      | <p>a. mempersiapkan dokumen, data dan informasi yang dibutuhkan Tim Teknis dalam penyusunan materi teknis;</p> <p>b. mempersiapkan penyelenggaraan surat-menyurat;</p> <p>c. mempersiapkan penyelenggaraan setiap kegiatan termasuk rapat-rapat lainnya;</p> <p>d. bertanggung jawab terhadap Tim Teknis; dan</p> <p>e. melaporkan setiap hasil kegiatan pada Tim Teknis.</p> |
| 2. | Marthein E. Rondo, S.Pi/ Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT                                      | Sekretaris |   |
| 3. | Peberina M. Lino, S.Pi /Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT                                       | Anggota    |   |
| 4. | Wahyuni Fanggi Tasik, S.Pi, M.Si /Akademisi pada Politeknik Pertanian Kupang                                      | Anggota    |   |
| 5. | Marce F. Koby, S.Pi / Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT   | Anggota    |   |
| 6. | Agustina S. Du'a Plewo, S.Pi/ Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT                                 | Anggota    |   |
| 7. | Merry Sherlince Ola, S.Pi/ Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Prov NTT  | Anggota    |   |
| 8. | Immanuel J. Emola, S.Pi, M.Si / Akademisi pada Universitas Kristen Artha Wacana Kupang                            | Anggota    |   |

|     |  |         |  |
|-----|--|---------|--|
| 9.  | Astuti Bunia, S.Pi / Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT | Anggota | a. mempersiapkan dokumen, data dan informasi yang dibutuhkan Tim Teknis dalam penyusunan materi teknis;<br>b. mempersiapkan penyelenggaraan surat-menyerat;<br>c. mempersiapkan penyelenggaraan setiap kegiatan termasuk rapat-rapat lainnya;<br>d. bertanggung jawab terhadap Tim Teknis; dan<br>e. melaporkan setiap hasil kegiatan pada Tim Teknis. |
| 10. | Samuel Batu, S.Pi / Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT  | Anggota |  |
| 11. | Brian Arnoldi, SH / Staf pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT  | Anggota |  |

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PLT. SEKRETARIS DAERAH,

  
**JOHANNA E. LISAPALY, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 196401101989032015